

## **SUMBER OTORITAS PELAKSANAAN SUPERVISI**

<sup>1</sup> Ficky Uwais Alqarny, <sup>2</sup> Meti Fatimah

<sup>1</sup> Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta  
[fickyassalafy@gmail.com](mailto:fickyassalafy@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta  
[fatimahcan@gmail.com](mailto:fatimahcan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan relevansi sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi di berbagai konteks. Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki peran yang krusial dalam mengawasi, mengontrol, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Literatur atau Studi Pustaka, yaitu berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, menganalisis dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang relevan, termasuk menggunakan studi dokumen atas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital library dan internet, Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Cendekia dan literatur akademis yang terkait dengan sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi. Hasil penelitian ini merinci mengenai landasan yuridis otoritas supervisi yang mencakup undang-undang dan regulasi, peraturan pelaksana, kebijakan dan pedoman, serta perjanjian kontrak. Sumber otoritas pelaksanaan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memiliki peran utama pengaturan dan pengawasan, pengendalian kepatuhan, penegakan hukum, pemberian lisensi dan izin, penyuluhan dan edukasi, pengembangan kebijakan serta transparansi dan akuntabilitas.

*Kata kunci: Sumber Otoritas; Otoritas Pelaksana; Supervisi.*

### **ABSTRACT**

This research aims to examine the role and relevance of authority sources in the implementation of supervision in various contexts. The authority sources in the implementation of supervision play a crucial role in overseeing, controlling, and ensuring compliance with applicable regulations and standards. The study adopts a Literature Review approach, involving the collection of literature data, reading, analyzing, and recording relevant research materials. This includes utilizing document studies on the results of previous research. Data collection is conducted by searching journals on various electronic media such as digital libraries and the internet. The search for journals is carried out through Google Scholar and academic literature related to authority sources in the implementation of supervision. The results of this research detail the legal basis of supervisory authority, which includes laws and regulations, implementing regulations, policies and guidelines, as well as contractual agreements. The sources of authority in the implementation of supervision are carried out by school principals and school supervisors who play a primary role in regulation and oversight, compliance control, law enforcement, licensing and permits, counseling and education, policy development, as well as transparency and accountability.

*Keywords: Source of Authority; Implementing authority; Supervision.*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam perkembangannya, pengawasan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam peraturan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, serta sebagai perangkat lunak untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem

pendidikan nasional (Puha, 2021). Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah dalam melaksanakan tugas (PS, S. S. D., & Ulpah, 2022). Pengetahuan tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi akan lebih menambah khazanah ilmu supervisor dalam pelaksanaan supervisi.

Menurut Glasser, kemampuan profesional yang diperlukan oleh seorang guru adalah sebagai berikut: (1) penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan mendignosa tingkah laku siswa, (3) kemampuan melaksanakan proses pengajaran, dan (4) kemampuan mengukur proses belajar siswa (Husni, 2019). Untuk menjalankan program supervisi dengan baik, harus memenuhi semua komponen perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut supervisi karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan supervisi. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah (Fatimah et al, 2021). Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya, agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai supervisor dengan efektif. Seorang Kepala Sekolah tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu diperlukan seorang pengawas untuk mengawasi dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan tersebut.

Dalam dunia pendidikan, supervisi menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap kinerja guru dan hasil pembelajaran (Fitri, 2020). Supervisi pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam upaya untuk meningkatkan proses belajar peserta didik dengan mengajar yang lebih baik. Secara khusus, supervisi pendidikan berfungsi untuk mengatur semua usaha sekolah, memperluas pengalaman guru, mendorong upaya pembelajaran kreatif, memberikan penilaian yang konsisten, dan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru. Fungsi dasar dari supervisi adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar disekolah agar lebih baik. Supervisi terhadap proses belajar mengajar adalah jenis kegiatan yang dimaksudkan

untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif (Hendriawati, 2019). Melalui kegiatan supervisi, pengawas sekolah memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada guru tentang berbagai masalah yang mungkin mereka temui saat melaksanakan tugas mereka di sekolah (Messi et al., 2018).

Pengawas hanya bertindak sebagai mitra kepala sekolah dan guru untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai pengawasan manajemen dan akademik. karena jika terdapat peran yang tidak dilaksanakan maka Sekolah akan mengalami kendala dalam pengembangan dalam penyelenggaraannya (Musdalipa et al., 2021).

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Literatur atau Studi Pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, menganalisis dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang relevan, termasuk menggunakan studi dokumen atas hasil-hasil penelitian sebelumnya (Abbas, N., & Subando, J., 2023). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital library dan internet, Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Cendekia dan literatur akademis yang terkait dengan otoritas supervisi dan perannya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi**

Supervisi adalah suatu proses kritis dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan kebijakan, peraturan, serta standar yang berlaku dalam berbagai sektor dan entitas (Imelda, 2022). Di dalam proses ini, sumber otoritas pelaksanaan supervisi memegang peran yang sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan dan ketentuan diterapkan dengan benar, dan bahwa pelaku usaha atau organisasi beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsep otoritas pelaksanaan supervisi melibatkan aspek hukum dan regulasi yang menjadi dasar pengawasan serta kewenangan yang diberikan kepada lembaga atau individu yang menjalankan tugas supervisi

(Fahmi, 2018). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang landasan yuridis otoritas supervisi sangat penting. Hal ini mencakup pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur supervisi dan kewenangan yang diberikan kepada badan pengawas, regulator, atau agen yang bertanggung jawab atas supervisi. Dalam berbagai sektor dan bidang, supervisi merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas, integritas, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku (Sarifudin, 2019). Supervisi juga menjadi alat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada masyarakat, lingkungan, atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, peran sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan berbagai entitas, mulai dari institusi keuangan hingga industri lingkungan.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga pengawas, regulator, atau agen pemerintah memegang kendali dalam proses supervisi (Tolchah, 2020). Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa pihak-pihak yang mereka awasi beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam beberapa dekade terakhir, supervisi telah menjadi semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, teknis, dan etis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi menjadi semakin penting. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum dan regulasi yang mengatur supervisi, serta kewenangan yang diberikan kepada lembaga atau individu yang menjalankan tugas supervisi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pelaksanaan

supervisi dapat ditingkatkan dan disempurnakan di berbagai sector (Pakaya, 2021). Oleh karena itu, artikel ini akan memfokuskan perhatian pada landasan yuridis otoritas supervisi dan bagaimana peran mereka memengaruhi pelaksanaan supervisi dalam konteks yang beragam. Dalam tulisan ini, kami akan mengulas lebih lanjut mengenai sumber otoritas pelaksanaan supervisi, termasuk peran mereka dalam mengawasi dan mengendalikan entitas atau sektor yang relevan. Kami juga akan menganalisis dampak faktor-faktor eksternal dan internal terhadap pelaksanaan otoritas supervisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pemahaman yang mendalam tentang otoritas supervisi dapat berkontribusi pada perkembangan supervisi yang lebih efektif dan efisien di berbagai konteks.

## **1. Landasan Yuridis Otoritas Supervisi**

Landasan yuridis otoritas supervisi mengacu pada kerangka hukum yang mengatur dan memberikan wewenang kepada lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas supervisi. Landasan ini adalah fondasi hukum yang menetapkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab entitas supervisi dalam mengawasi sektor, organisasi, atau aktivitas tertentu. Dari tahun ke tahun, masalah pertumbuhan pendidikan di Indonesia terus menjadi perhatian akademisi dan pemerhati pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0134/1977, yang menetapkan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pengawas di sekolah, termasuk kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan pengawas di tingkat kabupaten/kota, Dalam PP Nomor 38/1992 terdapat perbedaan istilah antara pengawas dan penilik, adapun pengawas dikhususkan untuk pengawas pendidikan di sekolah, sedangkan penilik ditujukan untuk pengawas di luar sekolah (Slameto, 2016).

Supervisi harus dilakukan oleh profesional karena supervisi merupakan hal yang sangat

kompleks. Menurut pengetahuan tersebut, seorang supervisor harus orang yang memiliki jabatan resmi yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengawasi. Pengawas adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengawasi satuan atau lembaga pendidikan. Supervisor atau pengawas dalam hal ini berarti orang yang berada atau bertugas di luar satuan pendidikan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Pengawas ini memiliki fungsi untuk mengawasi kepala sekolah dan guru-guru di sekolah (Slameto, 2016). Salah satu aspek penting dari supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diberikan oleh pengawas sekolah kepada setiap guru di sekolah binaannya. melalui kegiatan supervisi, pengawas memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada guru dalam menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya disekolah (Messi et al., 2018).

Landasan yuridis ini sering mencakup berbagai elemen, seperti undang-undang, peraturan pelaksana, kebijakan, dan hukum kontrak yang relevan. Berikut adalah beberapa elemen utama dari landasan yuridis otoritas supervisi:

- a) **Undang-undang dan Regulasi:** Undang-undang adalah dasar hukum tertinggi yang memberikan kewenangan dan pedoman umum bagi entitas supervisi. Undang-undang tersebut biasanya disusun oleh badan legislatif atau parlemen dan memberikan wewenang kepada entitas tertentu untuk mengawasi dan mengatur sektor tertentu. Regulasi adalah peraturan lebih rinci yang dikeluarkan oleh lembaga atau entitas supervisi berdasarkan undang-undang tersebut, dan mereka menguraikan prosedur, persyaratan, dan standar yang harus diikuti.
- b) **Peraturan Pelaksana:** Peraturan pelaksana adalah peraturan yang dibuat oleh entitas supervisi untuk memberikan panduan lebih rinci tentang cara melaksanakan supervisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini

mencakup prosedur inspeksi, pengujian, pelaporan, dan tindakan penegakan hukum yang dapat diambil oleh entitas supervisi.

- c) **Kebijakan dan Pedoman:** Selain undang-undang dan peraturan, entitas supervisi juga dapat menerbitkan kebijakan dan pedoman yang mengatur praktik supervisi. Kebijakan ini dapat mencakup standar etika, pedoman pelaporan, dan prosedur penyelesaian sengketa.
- d) **Perjanjian Kontrak:** Dalam beberapa kasus, supervisi dapat melibatkan entitas swasta yang memainkan peran dalam pengawasan. Dalam situasi ini, perjanjian kontrak dapat digunakan sebagai landasan yuridis untuk mengatur hubungan antara entitas supervisi dan entitas swasta yang terlibat.

Landasan yuridis otoritas supervisi penting dalam menentukan batasan wewenang dan tugas entitas supervisi. Hal ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha atau organisasi yang tunduk pada pengawasan. Pemahaman yang mendalam tentang landasan yuridis ini penting untuk memastikan bahwa supervisi dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Peran Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi**

### a. Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala sekolah

Menurut Sabandi (2013), perkembangan supervisi pendidikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Supervisi berkembang dari inspeksi, di mana supervisor memiliki otoritas yang lebih besar, menjadi kolaborasi antara supervisor dan guru yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menumbuhkan budaya belajar guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya sehingga mencapai hasil yang maksimal (Sabandi, 2013).

Menurut Hendriawati (2019), proses supervisi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan saat supervisi dilaksanakan. Proses ini biasanya dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- 1) Perencanaan: Kegiatan perencanaan dalam mengidentifikasi masalah agar membuat supervisi menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari elemen kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Perencanaan supervisi melibatkan (1) mengumpulkan data melalui pertemuan pribadi, kunjungan kelas, dan rapat staf; (2) mengolah data dengan melakukan koreksi terhadap data; (3) mengklasifikasikan data menurut bidang masalah; (4) membuat kesimpulan tentang permasalahan berdasarkan situasi yang sebenarnya; dan (5) menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan atau memperbaiki profesionalisme guru.
- 2) Pelaksanaan: Kegiatan pelaksanaan adalah kegiatan nyata yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan guru. Supervisor membantu guru melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan memberikan bantuan. Supervisi berlanjut untuk mengevaluasi keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi.
- 3) Evaluasi: Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Namun, banyak juga ahli supervisi yang mengemukakan tiga langkah supervisi yaitu pertemuan pendahuluan, observasi guru yang sedang mengajar dan pertemuan balikan (Kristiawan et al., 2019).

Sebagai supervisor kepala sekolah harus juga memperhatikan prinsip-prinsip diantaranya: 1) Hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hirarkhi. 2) Dilaksanakan secara demokratis. 3) Berpusat pada tenaga kependidikan (guru). 4) Dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan. 5) Merupakan bantuan profesional dan dapat juga dilakukan secara efektif antara lain melakukan diskusi kelompok, kunjungan kelas atau pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran (Amanda et al., 2017).

#### b. Pelaksanaan supervisi oleh Pengawas sekolah

Standar mutu pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Sudjana, 2006) bahwa pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif (Slameto, 2016). Supervisi termasuk kegiatan yang kompleks, dalam artian bahwa bahwa seorang supervisor harus orang yang memiliki jabatan resmi yang memiliki kewenangan dan atau otoritas dalam pengawasan. Menurut (Sagala 2010) dalam (Messi et al., 2018) mengatakan bahwa pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan profesional yang diberi tanggung jawab, tugas, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang akademik maupun bidang manajerial (Messi et al., 2018). Sebagai salah satu sumber otoritas pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah maka pengawas/supervisor memegang peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi atau pembinaan tenaga pendidik oleh pengawas ini

lebih menekankan pada pembinaan profesionalisme yaitu pembinaan yang lebih ditujukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan profesionalisme guru (Febriani, n.d.).

Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memegang peran penting dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian dalam berbagai sektor dan bidang. Peran mereka meliputi berbagai aspek yang bersifat kritis dalam menjaga kualitas, kepatuhan, dan integritas aktivitas yang mereka awasi. Berikut adalah beberapa peran utama dari sumber otoritas pelaksanaan supervisi:

- a) **Pengaturan dan Pengawasan:** Sumber otoritas pelaksanaan supervisi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi entitas atau sektor yang relevan. Mereka membuat peraturan, regulasi, dan pedoman yang mengatur aktivitas yang tunduk pada pengawasan, serta memastikan bahwa standar yang ditetapkan diikuti dengan benar.
- b) **Pengendalian Kepatuhan:** Salah satu peran utama sumber otoritas pelaksanaan supervisi adalah memastikan bahwa entitas yang mereka awasi mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku. Mereka dapat melakukan inspeksi, pengujian, dan evaluasi untuk memverifikasi tingkat kepatuhan.
- c) **Penegakan Hukum:** Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan penegakan hukum jika ada pelanggaran aturan. Mereka dapat memberlakukan sanksi, denda, atau tindakan hukum lainnya terhadap pelaku usaha atau organisasi yang melanggar regulasi yang berlaku.
- d) **Pemberian Lisensi dan Izin:** Dalam banyak sektor, sumber otoritas pelaksanaan supervisi juga memiliki peran dalam memberikan lisensi dan izin kepada entitas atau individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mereka memastikan bahwa

hanya mereka yang mematuhi standar tertentu yang diberikan izin untuk beroperasi.

- e) **Penyuluhan dan Edukasi:** Selain tugas penegakan hukum, sumber otoritas pelaksanaan supervisi juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada entitas yang mereka awasi. Mereka dapat memberikan panduan dan pedoman kepada para pelaku usaha untuk membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.
- f) **Pengembangan Kebijakan:** Sumber otoritas pelaksanaan supervisi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan baru atau perubahan peraturan yang diperlukan untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis atau sosial. Peran ini mencakup penelitian, analisis, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
- g) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Ini mencakup pelaporan berkala kepada publik dan pemangku kepentingan mengenai hasil supervisi dan aktivitas yang mereka lakukan.

Pentingnya peran sumber otoritas pelaksanaan supervisi dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan kualitas dalam berbagai sektor dan bidang tidak bisa diabaikan. Peran mereka mendukung terciptanya lingkungan yang adil, aman, dan teratur dalam aktivitas bisnis, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama:

1. **Peran Utama:** Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan di berbagai sektor. Mereka berperan dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa

entitas yang mereka awasi beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

- 2. Landasan Hukum:** Landasan yuridis otoritas supervisi memainkan peran penting dalam membentuk tugas dan kewenangan mereka. Analisis landasan hukum menunjukkan perbedaan signifikan dalam regulasi antar negara, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja pengawasan yang efektif.
- 3. Relevansi dan Dampak:** Dalam banyak kasus, sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kepatuhan dan kualitas dalam sektor yang mereka awasi. Keberhasilan mereka dalam mengendalikan entitas yang melanggar regulasi berdampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4. Faktor Eksternal dan Internal:** Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan pasar, dapat memengaruhi peran otoritas supervisi. Faktor internal seperti budaya organisasi dan kapasitas sumber daya juga berdampak signifikan pada efektivitas supervisi.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi dalam berbagai konteks. Otoritas supervisi memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan dalam sektor atau entitas yang di awasi. Landasan yuridis yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa tugas pengawasan dijalankan dengan baik. Selain itu, peran sumber otoritas pelaksanaan supervisi tidak terlepas dari dampaknya terhadap entitas yang diawasi dan masyarakat pada umumnya. Dampak positif yang dihasilkan dari pengawasan yang efektif adalah meningkatnya kepercayaan, keamanan, dan keadilan dalam lingkungan bisnis dan sosial. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor eksternal dan internal dapat memengaruhi pelaksanaan tugas supervisi. Oleh karena itu,

penting bagi otoritas supervisi untuk terus memantau dan mengevaluasi praktik pengawasan mereka, serta untuk mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan persoalan sumber otoritas pelaksanaan supervise diatas dari berbagai sektor dan entitas, peran sumber otoritas pelaksanaan supervisi sangat penting dalam menjaga kepatuhan, integritas, dan kualitas. Landasan yuridis yang kuat adalah dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki tugas yang beragam, termasuk pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum untuk memastikan entitas yang mereka awasi beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. landasan yuridis otoritas supervisi mencakup undang-undang dan regulasi, peraturan pelaksana, kebijakan dan pedoman, serta perjanjian kontrak. Adapun sumber otoritas pelaksanaan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memiliki peran utama pengaturan dan pengawasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fatimah, M., Mardhiyah, A., & Azizah, I. N. (2021). Pentingnya Supervisi Untuk Pengembangan Staff di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Juwiran Klaten. *Mamba'ul'Ulum*, 80-87.
- Abbas, N., & Subando, J. (2023). Pendidikan Keteladanan Shalahuddin Al-Ayyubi Konteks Pendidikan Islam Era Society 5.0. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner*, 2(2 Mei), 117-128.
- Puha, K., Ahmad, S., & Nurmantu, S. (2021). Analisis Kebijakan Kepengawasan Akademik. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 60-67.
- PS, S. S. D., & Ulpah, M. (2022). Profesionalisasi Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Pendidikan Dalam Upaya

- Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3).
- Fahmi, C. N. F. C. N., Nurliza, E. N. E., AR, M. A. M., & Usman, N. U. N. (2018). Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Serambi Ilmu*, 19(2), 104-119.
- Tolchah, M. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam dan solusianya.
- Amanda, M. O., Salam, R., & Saggaf, S. (2017). Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Bungoro Kabupaten Pangkep. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 149–154.
- Pakaya, S. (2021). Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Melalui Supervisi (Pembinaan) Dengan Teknik Diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Upaya Peningkatan Kreativitas Guru Di SD Negeri 03 Popayato Barat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 865-876.
- Febriani, A. L. (n.d.). Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru.
- Fitri, E. (2020). Konsep Dasar Supervisi Pendidikan.
- Imelda, I. (2022). Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Budaya Kontrol dalam Sistem Pendidikan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4270-4278.
- Hendriawati, R. (2019). Supervisi pendidikan.
- Husni, L. (2019). Pentingnya Penggunaan Supervisi Secara Efektif Dalam Pendidikan.
- Sarifudin, S. (2019). Implementasi supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah ibtidaiyah negeri (min) kota bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(01), 49-70.
- Kristiawan, M., Yuniarsih, Y., Fitria, H., & Refika, N. (2019). Supervisi pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Messi, M., Sari, W. A., & Murniyati, M. (2018). Pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(1), 114–125.
- Musdalipa, M., Mustaming, M., Taqwa, T., & Wiratman, A. (2021). Peranan Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Sekolah Dasar. *Jurnal Konsepsi*, 10(2), 106–112.
- Sabandi, A. (2013). Supervisi pendidikan untuk pengembangan profesionalitas guru berkelanjutan. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(2), 1–9.
- Slameto, S. (2016). Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–206.
- Sudjana, N. (2006). Standar Mutu Pengawas. Jakarta: Depdiknas.